

Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong

Ahmad Sururi, Rahmi Mulyasih
Universitas Serang Raya
sururiahmad20@gmail.com

Abstract: *Participatory development planning and gotong royong in encouraging the strengthening of village officials and empowering rural community through innovation of development planning policy based on the concept of Rembug, Plan, Realization and Rawat is a grand design of development planning by placing society as center of development as well as actor has a major role in village development planning by prioritizing local resources and potential based on local wisdom. The main focus of this dedication is to provide socialization and mentoring both theoretical and practical in the development of the concept of development planning policy based on the concept of 4R namely Rembug, Plan, Realization and Rearing which aims to empower and improve community skills in preparing development planning with priority resources and local potential which are owned. The method used is participatory village assessment and Participatory Learning and Action by emphasizing on the 4R concept of rembug, plan, realization and care. Based on the results obtained from the mentoring are: 1) Cilangkap Village community as a community service partner has a great response and enthusiasm in the process of mentoring development planning. This can be seen from the number of community attendance in the village meeting villagers with an average attendance of 60% of the total number of households in each village; 2) As one of the villages that are still relatively poor, the community's enthusiasm in following the mentoring program needs to be appreciated as part of the community's awareness of the importance of development designed from, by and for the community; 3). The ability of the community to design the development planning through the formation of development planning organizations, independent village survey activities and rembug activities, plans, realization and care can be run well although with all the limitations owned but not reduce the substance of the growth process of community empowerment and community motivation in the development planning activities.*

Keywords: *Community Empowerment, development planning*

Pendahuluan

Perwujudan dimensi pembangunan yang berbasis pemerataan dan kewilayahan disertai membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan merupakan amanat Nawacita. Daya saing desa dengan potensi lokal yang beragam memungkinkan setiap desa untuk berkembang sesuai dengan agenda perencanaan pembangunan dengan berbasiskan kearifan lokal. Dalam amanat Nawacita disebutkan bahwa pembangunan Desa

dan kawasan perdesaan dilakukan melalui pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, mewujudkan desa berkelanjutan dan membangun keterkaitan desa-kota melalui: pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di kota-kota sedang dan kecil pada pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Karakteristik Desa dengan ragam potensi lokal yang dimiliki dan dukungan masyarakat yang masih mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan partisipatif, kepercayaan, toleransi serta gotong royong merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan kawasan perdesaan. Perwujudan modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur utama seperti trust, keimbalbalikan, dan aturan kolektif.¹ Dan hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan dari berbagai pihak dalam mendorong modal sosial perdesaan yang telah dimiliki yang dikolaborasikan dengan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong perubahan paradigma pembangunan desa yang selama ini terpusat atau menempatkan desa sebagai objek menjadi desentralisasi atau menempatkan desa sebagai subjek maka diperlukan pemberdayaan masyarakat yang inovatif melalui *grand design* perencanaan pembangunan partisipatif yang memberikan prioritas dan *space* bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang dimiliki. Dampak dan manfaat yang diharapkan dari inovasi pemberdayaan dan penerapan *grand design* perencanaan pembangunan partisipatif adalah penguatan kapasitas masyarakat desa melalui aktor-aktor kebijakan pembangunan sebagai subjek formulasi kebijakan.

Perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu kewenangan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disusun sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang disusun secara berjangka untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka

¹ J Hasbullah, *Social Capital* (Jakarta: United Press, 2006).

waktu 1 (satu) tahun.² Perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota disusun melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Meskipun musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan aspek pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa yang masih bersifat sentralistik dimana masih besarnya pengaruh kepala desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat belum mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai forum dialog antara warga dan aparat pemerintahan desa dalam membahas permasalahan-permasalahan strategis pembangunan perdesaan berjalan seremonial dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban bagi aparat pemerintah desa. Kehadiran masyarakat pada musyawarah desa diposisikan secara pasif dan hanya mendengarkan program-program kerja pembangunan desa yang telah diinisiasi oleh aparat pemerintahan desa. Masyarakat belum secara aktif dan diikutsertakan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi hambatan-hambatan.

Disisi lain musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya menjadi forum perencanaan pembangunan perdesaan yang bersifat jangka pendek dan tidak melibatkan masyarakat desa dalam aspek perencanaannya. Hal ini disebabkan karena agenda perencanaan pembangunan desa tidak disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui forum-forum musyawarah warga desa di tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sehingga urgensi perencanaan pembangunan desa hanya melihat kepentingan desa secara umum dan tidak melihat kepentingan masyarakat desa di tiap-tiap dusun dan kampung yang membutuhkan pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya lokal.

Permasalahan pembangunan yang tidak melibatkan sumber daya lokal seperti masyarakat desa dan potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi salah satu permasalahan perencanaan

² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014).

pembangunan yang belum akomodatif. Pembangunan desa dalam pelaksanaannya memanfaatkan pihak ketiga atau investor dengan pemanfaatan teknologi tingkat tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat desa hanya berperan menjadi penonton dan tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan.

Penguatan kapasitas masyarakat desa terkait grand desain perencanaan pembangunan memiliki urgensi untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan desa termasuk penggunaan sumber daya lokal. Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan yang memberikan daya pendekatan pembangunan partisipatif masyarakat sebagai basis pengambilan keputusan dalam upaya menggerakkan perekonomian perdesaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang politik, memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu melalui sebuah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.³

Melalui *grand design* perencanaan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat lokal maka diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap sebuah proses pembangunan akan lebih terakomodir, hal tersebut didasarkan pada kondidi objektif bahwa yang paling tahu dan memahami apa dan bagaimana kebutuhan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, *grand design* perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai aktor utama pembangunan merupakan sebuah bentuk kemandirian dan partisipasi yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan masyarakat di desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Desa Cilangkap merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan jarak 7 Km dari kecamatan dan jarak 70 km dari pusat kabupaten. Secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Parungpanjang dan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari

³ Mardikanto T and Soebiato P, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013). 100.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senanghati Kecamatan Malingping

Desa Cilangkap memiliki luas wilayah 831,7 Ha, dengan pemanfaatan areal persawahan 44 Ha, peladangan 318,8 Ha, Pemukiman 53 Ha, Perkebunan 96 Ha, fasilitas umum desa 15,9 Ha dan Kehutanan 310 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.178 jiwa dan 577 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.148 laki-laki dan 1.030 perempuan dengan jumlah KK miskin sebanyak 566. Secara umum aksesibilitas menuju Desa Cilangkap relatif mudah karena terletak di antara jalan poros kecamatan dan jalan batas desa, jenis jalan alternatif poros kecamatan dan desa adalah tanah, pasir batu dan jalan aspal akan tetapi untuk menuju kantor desa relative sulit dijangkau oleh transportasi umum karena akses jalan transportasi adalah jalan batu (macadam) dan minimnya aspal hotmix sedangkan aksesibilitas kesulitan lainnya menuju Desa Cilangkap adalah karena letaknya yang jauh dari pusat kabupaten dan berada di daerah pinggiran selatan Kabupaten Lebak.

Data dan potensi ekonomi Desa Cilangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah Desa yang sebagian besar dikelilingi oleh areal kehutanan dan perkebunan rakyat, adapun potensi Desa Cilangkap yang ditinjau baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam sampai saat ini potensi tersebut belum benar-benar optimal diberdayakan.

Permasalahan

Berdasarkan analisis situasi melalui observasi, wawancara dan survey yang telah dilakukan terdapat berbagai permasalahan yang disepakati, diantaranya yaitu:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa sebagai forum dialog warga dalam membahas permasalahan-permasalahan pembangunan perdesaan belum memberikan ruang partisipasi terhadap warga dalam mengemukakan kebutuhannya dan dilakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban bagi aparat desa.
2. Makna Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa hanya menjadi forum perencanaan pembangunan perdesaan yang bersifat jangka pendek dimana warga desa diposisikan secara pasif hanya untuk mendengarkan program-program pembangunan yang akan dijalankan.

3. Masih dominannya pengaruh kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan strategis dengan tidak melibatkan warga desa secara aktif sehingga menghambat aspirasi dan partisipasi warga dalam proses pembangunan.
4. Kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan menjadi terhambat karena pembangunan dilaksanakan oleh pihak ketiga/investor dengan pemanfaatan teknologi tingkat tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Kapasitas Masyarakat dilaksanakan melalui: (1) memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan, (2) mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Sedangkan Metode yang digunakan adalah gabungan dari dua metode pemberdayaan masyarakat yaitu *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif dan *Participatory Learning and Action* (PLA) atau proses belajar/praktik secara partisipatif.

Metode *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan;
- 2) Analisis keadaan yang berupa:
 - Keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungan di masa depan;
 - Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya;
 - Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
 - Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis *strength, weakness, opportunity and threat* (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
- 3) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien dan diterima oleh sistem sosialnya)
- 4) Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.

Selanjutnya metode pengabdian masyarakat berkonsep *Participatory Learning and Action* (PLA) dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan masyarakat dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya lebih dikenal dengan ‘*Learning by Doing*’ atau belajar sambil bekerja.⁴⁵ *Participatory Learning Action* merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan secara interaktif dalam suatu proses kerja.⁶

Berdasarkan kedua metode pemberdayaan masyarakat tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1. Berikut penjelasan pada masing-masing tahap kegiatan.

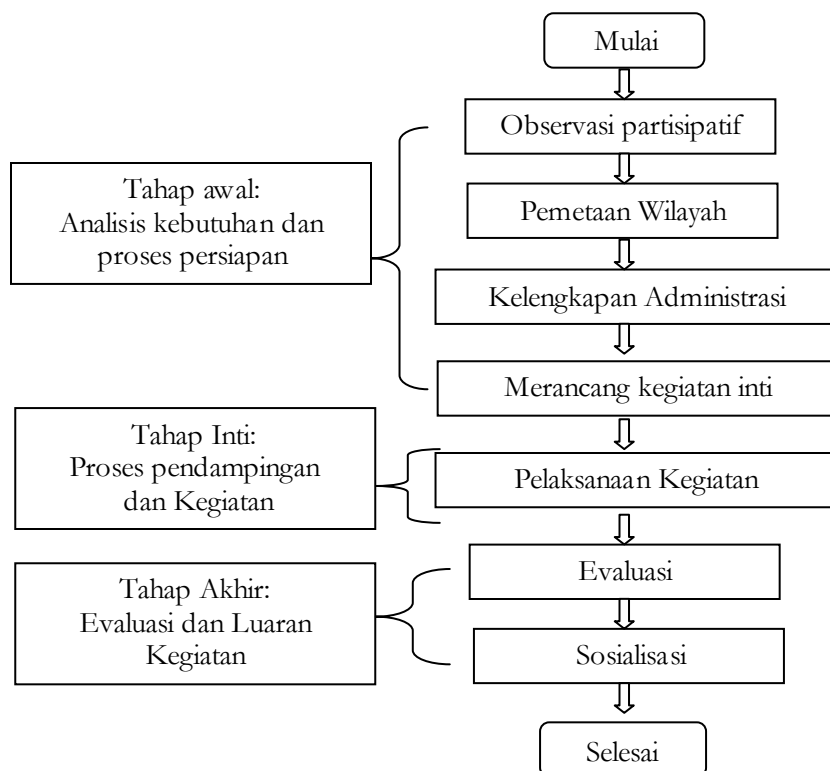
- 1) Tahap awal. Kegiatan pada tahap ini meliputi (a) observasi partisipatif dan survey. Dilakukan sebagai analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan di desa dan mencari solusi yang dibutuhkan dan tepat sasaran; (b) pemetaan wilayah desa, (c) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian; dan (c) merancang kegiatan inti berupa analisis keadaan dan pemilihan alternatif pemecahan masalah dan pembagian peran para pihak yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.
- 2) Tahap inti. Dalam tahap kedua ini, fokus kegiatan pengabdian dilakukan yaitu melakukan diskusi, pendampingan dan bimbingan melalui serangkaian kegiatan. Ada lima kegiatan yang akan diikuti oleh mitra, yaitu:
 - a. Sosialisasi kebutuhan masyarakat dan identifikasi permasalahan melalui kegiatan rembug warga
 - b. Melakukan analisis keadaan yang berupa keadaan masa lalu, sekarang dan kecenderungan di masa depan;

⁴ K. Phuyal, “Participatory Learning and Action [PLA]: A Brief Introduction.”

⁵ Aprillia Theresia and et all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2104).

⁶ K. Appel, K., Buckingham, E Jodoin and D. Roth, *Participatory Learning and Action Toolkit: For Application in BSR’s Global Programs* (Paris: BSR, 2012).

- c. Melakukan identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya;
 - d. Menyusun alternatif pemecahan masalah
 - e. Melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis strength, weakness, opportunity and threat (SWOT) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
 - f. Merumuskan pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan
 - g. Menyusun pembagian peran para stakeholders dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.
- 3) Tahap akhir. Ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu (a) evaluasi kegiatan yang akan dilakukan per kegiatan dan secara menyeluruh; (b) sosialisasi *grand design* perencanaan pembangunan



Hasil dan Diskusi

Kegiatan pendampingan ini dilakukan selama 6 (enam) bulan yaitu minggu ketiga bulan September 2016 s/d minggu keempat bulan Maret 2017.

Tahap Awal (Sosialisasi Desa)

Sosialisasi desa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dan tema kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi desa tahap satu

Pada tahap ini, proses pendampingan dilakukan dengan melakukan ceramah dan diskusi dengan warga desa, materi yang disampaikan adalah terkait dengan tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pentingnya perencanaan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat sebagai salah satu pilar kebijakan partisipatif masyarakat dan gotong royong. Peserta dalam kegiatan sosialisasi desa tahap satu ini berjumlah 43 orang yang berasal dari 7 (tujuh) dusun yang terdiri dari ketua dusun dan tokoh masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi Desa Tahap 1

2. Sosialisasi desa tahap dua

Pada tahap awal ini disusun rancangan kegiatan inti berupa analisis keadaan desa, identifikasi kebutuhan pembangunan, pemilihan alternatif pemecahan masalah dan sosialisasi konsep perencanaan pembangunan 4 (empat) R yaitu Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat. Peserta dalam kegiatan sosialisasi desa tahap satu ini berjumlah 27 orang yang berasal dari 7 (tujuh) dusun yang terdiri dari ketua dusun dan tokoh masyarakat.

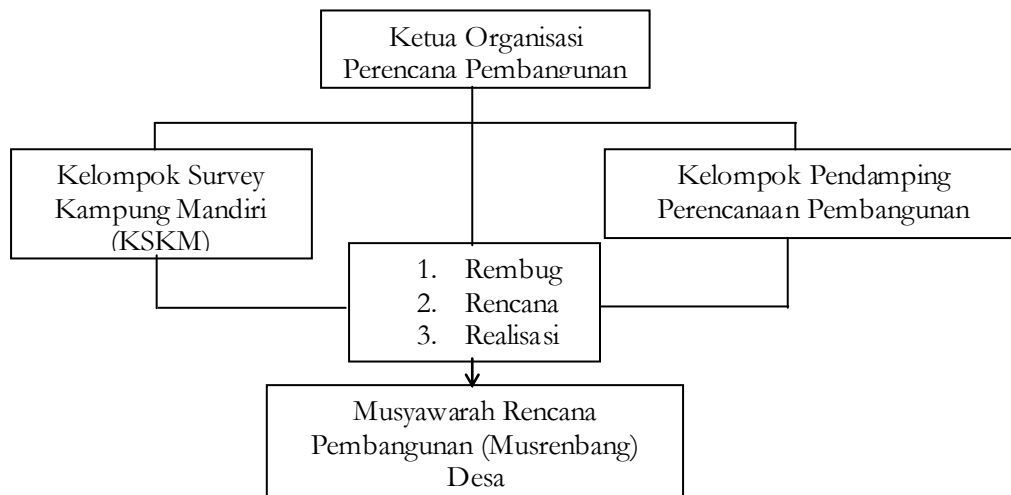
3. Sosialisasi desa tahap tiga

Pada tahap ketiga ini, dilakukan pembagian peran para pihak yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan

sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Output dari kegiatan sosialisasi tahap ketiga adalah terbentuknya susunan Organisasi Perencana Masyarakat Desa (OPMD) yang berasal dari unsur pemerintahan desa, kepala Dusun, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.



Gambar 3. Sosialisasi Desa Tahap 3 dan Pemilihan Ketua OPPD



Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Perencana Pembangunan Desa

a) Organisasi Perencana Pembangunan Desa (OPP) adalah warga masyarakat desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Adapun persyaratan yang harus dimiliki adalah memiliki kemampuan baca tulis dan dapat diterima oleh semua pihak baik dari unsur pemerintahan desa maupun lapisan masyarakat setempat.

Peran OPPD adalah sebagai penanggung jawab operasional perencanaan pembangunan desa

- b) Kelompok Survey Kampung Mandiri (KSKM) adalah kelompok yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh pemuda dan perwakilan masyarakat dari tiap RT dan RW. KSKM harus bersifat representatif karena bertugas melakukan survey mandiri kesetiap kampung/dusun untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan desa baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik.
- c) Kelompok Pendamping Perencanaan Pembangunan Desa (KP3D) adalah tim pendamping yang akan memberikan saran dan masukan terkait dengan perencanaan pembangunan. Anggota KP3D terdiri dari aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan ketua RT/RW dari masyarakat.

Fokus kegiatan dari ketiga organisasi masyarakat lokal yang telah dibentuk adalah menyusun perencanaan pembangunan dengan berbasis pada konsep 4R yaitu Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat sebagai langkah-langkah inovasi kebijakan perencanaan pembangunan desa. Kemudian hasil dari formulasi kebijakan perencanaan pembangunan disampaikan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa yang merupakan mekanisme formil perencanaan pembangunan desa.

Tahap Kedua (Survey Kampung Mandiri)

Setelah organisasi lokal terbentuk, kemudian dilakukan survey kampung mandiri yang dilakukan oleh KSKM yang telah terbentuk. Tugas dan tanggung jawab KSKM adalah melakukan survey mandiri kesetiap kampung/dusun untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan pembangunan desa baik dari segi pembangunan fisik maupun non fisik.



Gambar 5. Kondisi Rumah Warga Desa Cilangkap

Hasil suvey Kampung Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Survey Kampung Sukasari 1

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	62	Sarana infrastruktur jalan kampung yang masih berupa tanah sehingga menghambat akses transportasi	Pembangunan Jalan telford/ Makadam
2		Jembatan penghubung antar dusun terbuat dari kayu dan sudah dalam kondisi rusak	Pembangunan Jembatan

Tabel 2. Hasil Survey Kampung Sukasari 2

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	48	Rusaknya saluran irigasi yang menyebabkan aliran air irigasi di wilayah desa tidak lancar dan berpengaruh terhadap hasil pertanian	Pembangunan irigasi
2		Pada umumnya warga masih belum memiliki WC dirumahnya sehingga sebagian dari mereka kerap kali buang hajat di areal persawahan ataupun di kali	Pembangunan infrastruktur MCK bagi masyarakat



Gambar 6. Kondisi Jalan di Kampung Sukasari 1

Tabel 3. Hasil Survey Kampung Pematang Karet

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	25	Jembatan penghubung antar dusun masih terbuat dari bambu dan sudah rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian yang memiliki beban berat	Pembangunan jembatan
2		Kondisi poskamling yang sudah rusak	Pembangunan poskamling

Tabel 4. Hasil Survey Kampung Lebak Jaha

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	73	Untuk mencuci dan mandi, sebagian warga masih menggunakan air kali	Pembangunan MCK
2		Belum adanya bangunan TK dan SD dan bangunan sarana lainnya	Pembangunan sarana lembaga pendidikan TK dan SD
3		Belum adanya instalasi air minum bersih bagi warga	Kebutuhan pembangunan instalasi air minum

Tabel 3. Hasil Survey Kampung Pematang Karet

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	25	Jembatan penghubung antar dusun masih terbuat dari bambu dan sudah rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian yang memiliki beban berat	Pembangunan jembatan
2		Kondisi poskamling yang sudah rusak	Pembangunan poskamling

Tabel 4. Hasil Survey Kampung Lebak Jaha

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	73	Untuk mencuci dan mandi, sebagian warga masih menggunakan air kali	Pembangunan MCK
2		Belum adanya bangunan TK dan SD dan bangunan sarana lainnya	Pembangunan sarana lembaga pendidikan TK dan SD
3		Belum adanya instalasi air minum bersih bagi warga	Kebutuhan pembangunan instalasi air minum

Tabel 5. Hasil Survey Kampung Warung Jogjog

No	Jumlah KK	Permasalahan dan Potensi	Kebutuhan dan usulan kegiatan
1	92	Sebagai pusat desa, bangunan kantor desa sudah tidak layak	Pembangunan sarana kantor desa
2		Belum adanya sarana penerangan jalan umum disepanjang jalan desa	Pembangunan sarana PJU
3		Sarana pertanian masih manual	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian



Gambar 7. Diskusi dengan warga Kampung Cikaredok (kiri) dan Kondisi Jembatan bambu Kampung Pematang Karet (kanan)

Tabel 6. Hasil Survey Kampung Cikaredok

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	25	Bangunan posyandu tidak ada	Pembangunan Posyandu
2		Saluran induk pembuangan limbah	Pembangunan drainase
3		Sebagian warga belum memiliki MCK	Pembangunan MCK untuk warga

Tabel 7. Hasil Survey Kampung Ciparaha

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	48	Jalan kampung masih berupa tanah	Pembangunan jalan Paving Block
2		Belum adanya bangunan SD sehingga menyulitkan anak-anak usia SD bersekolah dan harus menempuh jarak yang cukup jauh	Pembangunan sarana pendidikan SD

Tabel 8. Hasil Survey Kampung Cisujen

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	36	Sebagian besar bangunan rumah warga sangat tidak layak	Pembangunan rumah warga
2		Sarana jembatan sebagai penghubung antar dusun masih terbuat dari bambu	Pembangunan Jembatan

Tabel 9. Hasil Survey Kampung Dongdong

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	82	Sarana jalan berupa tanah sehingga menyulitkan akses transportasi warga	Pembangunan Jalan
2		Sebagian rumah warga belum teraliri listrik	Pembangunan gardu listrik yang dialirkan ke rumah-rumah warga

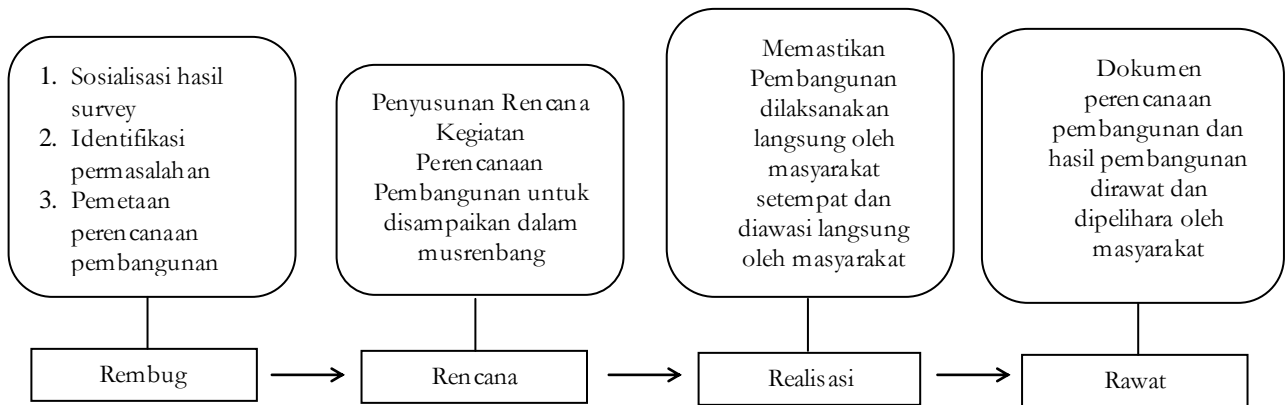
*Gambar 9. Kantor Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam***Tabel 10. Hasil Survey Kampung Sawah**

No	Jumlah KK	Prioritas Permasalahan	Kebutuhan
1	67	Penggunaan alat pertanian yang masih manual	Penyediaan sarana pertanian
2		Belum adanya sarana drainase dalam mengalirkan air ke sungai-sungai	Pembangunan drainase
3		Akses jalan penghubung tanah dan menyulitkan warga dalam kondisi hujan	

Secara umum kondisi infrastruktur desa Cilangkap yang terdiri dari 10 (Sepuluh) kampung masih memprihatinkan baik dari akses dan kondisi jalan kampung, bangunan jembatan penghubung maupun kondisi rumah warga yang masih dalam kondisi kurang layak. Sedangkan dari hasil survey didapatkan data bahwa sebagian besar masyarakat desa Cilangkap bermata pencaharian sebagai buruh tani dan berada dalam taraf keluarga pra sejahtera.

Tahap Inti (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat)

Setelah proses hasil survey kampung mandiri diketahui, selanjutnya dilakukan penyusunan grand design perencanaan pembangunan dengan berpedoman kepada konsep 4 R yaitu Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat.

**1. Rembug**

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil survey kampung mandiri. Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah:

- Melakukan sosialisasi hasil survey melalui rembug warga.
- Melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan. Hasil kesimpulan dari masing-masing rembug berdasarkan pemetaan masalah yang dilakukan di 10 (sepuluh) diuraikan dalam analisis prioritas kebutuhan usulan kegiatan perencanaan pembangunan
- Analisis prioritas perencanaan pembangunan

Dari berbagai kebutuhan dan usulan kegiatan tiap-tiap dusun maka dapat disimpulkan pemetaan perencanaan pembangunan untuk setiap kampung adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis Prioritas Kebutuhan Perencanaan Pembangunan

No	Lokasi Kampung	Analisis Prioritas Kebutuhan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan
1	Sukasari 1	Pembangunan jalan telford
2	Sukasari 2	Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum memiliki
3	Pematang Karet	Pembangunan Jembatan penghubung
4	Lebak Jaha	Pembangunan sarana pendidikan TK dan SD dan pembangunan sarana air minum
5	Warung Jogjog	Pembangunan sarana kantor desa

6	Cikaredok	Pembangunan drainase
7	Ciparaha	Pembangunan Jalan paving block
8	Cisujen	Pembangunan jembatan
9	Dongdong	Pembangunan gardu listrik
10	Kampung Sawah	Pembangunan jalan akses penghubung

Tahap selanjutnya adalah menginventarisir prioritas kebutuhan usulan kegiatan tersebut dalam sebuah analisis pemetaan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis Nilai dari kebutuhan dan Usulan Kegiatan

No	Aspek Penilaian	Nilai	Nilai dari kebutuhan dan usulan kegiatan																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	Kegiatan pembangunan meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar																				
	A = Iya	A = 3	3	2	1	3	3	1	1	3	3	3									
	B = Kurang	B = 1																			
	C = Tidak																				
2	Kegiatan pembangunan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara produktif																				
	A = Sangat mendukung	A = 3	2	1	2	3	2	1	2	2	2	2									
	B = Kurang Mendukung	B = 2																			
	C = Tidak mendukung	C = 1																			
3	Kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat setempat secara langsung																				
	A = Melibatkan	A = 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	B = Tidak Melibatkan	B = 1																			
4	Manfaat pembangunan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa setempat																				
	A = Dirasakan	A = 2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	B = Kurang dirasakan	B = 1																			
5	Lahan yang akan digunakan merupakan milik umum/desa																				
	A = Milik Desa	A = 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
	B = Bukan Milik Desa	B = 1																			
6	Besarnya biaya pembangunan dapat dijangkau oleh anggaran desa																				
	A = Dapat dijangkau	A = 2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2									
	B = Tidak dapat dijangkau	B = 1																			
7	Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan teknologi sederhana berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia																				
	A = Teknologi sederhana dan dapat	A = 2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2									

diterapkan	B = 1										
B = Teknologi tinggi dan tidak dapat diterapkan											
8 Waktu pelaksanaan pembangunan											
A = < 3 bulan	A = 2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2
B = > 3 bulan	B = 1										
Total Nilai		15	14	12	18	16	12	14	18	18	17
Peringkat		4	5	8	1	3	7	6	1	1	2

Berdasarkan tabel 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat pertama dan memperoleh nilai tertinggi 18 pada pelaksanaan rembug di Desa Cilangkap adalah pembangunan sarana pendidikan TK dan SD dan pembangunan sarana air minum di Kampung Lebak Jaha, pembangunan jembatan penghubung antar kampung di Kampung Cisujen dan pembangunan gardu listrik di Kampung Dongdong. Kemudian nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat kedua, ketiga dan keempat dengan masing-masing nilai sebanyak 17, 16 dan 15 adalah pembangunan akses jalan penghubung di Kampung Sawah, pembangunan sarana kantor desa di Kampung Warung Jogjog dan pembangunan jalan telford di Kampung Sukasari 1. Selanjutnya nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat kelima dan keenam dengan masing-masing nilai sebanyak 14 adalah pembangunan MCK di Kampung Sukasari 2 dan pembangunan jalan paving block di Kampung Ciparaha. Sedangkan nilai kebutuhan dan usulan kegiatan yang mendapatkan peringkat ketujuh dan kedelapan dengan masing-masing nilai 12 adalah pembangunan jembatan penghubung di kampung Pematang Karet dan pembangunan drainase di kampung Cikaredok

Dari hasil pemetaan perencanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan aspek penilaian dari analisis kebutuhan dan usulan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Analisis prioritas, peringkat dan waktu Perencanaan Pembangunan

No	Analisis prioritas Kebutuhan usulan kegiatan	Peringkat	Waktu perencanaan Pembangunan
1	Pembangunan jalan telford	4	Tahun kedua
2	Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum memiliki	5	Tahun ketiga
3	Pembangunan Jembatan penghubung	8	Tahun keempat
4	Pembangunan sarana pendidikan TK dan SD dan pembangunan sarana air minum	1	Tahun pertama
5	Pembangunan sarana kantor desa	3	Tahun kedua
6	Pembangunan drainase	7	Tahun keempat
7	Pembangunan Jalan paving block	6	Tahun ketiga
8	Pembangunan jembatan	1	Tahun pertama
9	Pembangunan gardu listrik	1	Tahun pertama
10	Pembangunan jalan akses penghubung	2	Tahun kedua

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di tahun pertama terdapat tiga kegiatan yaitu pembangunan sarana pendidikan TK dan SD serta pembangunan sarana air minum, pembangunan jembatan dan pembangunan gardu listrik. Pada tahun kedua akan direncanakan pembangunan jalan telford, pembangunan sarana kantor desa dan pembangunan jalan akses penghubung antar dusun. Kemudian pada tahun ketiga akan direncanakan pembangunan MCK dan pembangunan jalan paving block. Sedangkan pada tahun keempat perencanaan pembangunan akan diprioritaskan pada pembangunan jembatan penghubung dan pembangunan saluran drainase.

2. Rencana

Pada intinya rencana mencakup tentang perencanaan pembangunan masyarakat yang telah disepakati dan diusulkan dalam bentuk rencana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat yang akan disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Pada tahap rencana ini, ditetapkan rencana pembangunan berbasis partisipatif dan gotong royong. Perencanaan pembangunan partisipatif dan gotong royong yang disepakati mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pengukuran lokasi pembangunan
- Pengaturan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, calon tenaga kerja dan besaran upah);
- Pengaturan bahan dan alat yang akan digunakan;
- Pengaturan waktu pencapaian.



Gambar 10. Pengukuran Lokasi Pembangunan

3. Realisasi

- Tahap realisasi pekerjaan dilakukan oleh masyarakat setempat secara partisipatif dan gotong royong
- Keterlibatan masyarakat diperlukan sebagai bagian dari komitmen bersama masyarakat
- Apabila realisasi pembangunan dilakukan di dusun 1, maka aktor utama pembangunan adalah masyarakat dusun 1 dan didukung oleh masyarakat dusun sekitarnya.
- Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa rencana kegiatan pembangunan diakomodir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa oleh karena itu masyarakat berperan secara aktif dalam forum Musrenbang tersebut

4. Rawat

Pada tahap ini masyarakat adalah aktor penerima manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga perannya dalam melakukan pemeliharaan atau merawat hasil pembangunan sangatlah penting

Kesimpulan dan Saran

Dari pendampingan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Masyarakat Desa Cilangkap sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki respon dan antusias yang sangat besar dalam proses pendampingan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam forum rembuk warga kampung dengan jumlah kehadiran rata-rata sebesar 60% dari total jumlah KK di setiap kampung.

Sebagai salah satu desa yang sebagian besar masih tergolong kurang sejahtera/miskin, antusias masyarakat dalam mengikuti program pendampingan perlu mendapatkan apresiasi

sebagai bagian dari upaya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang dirancang dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kemampuan masyarakat dalam merancang perencanaan pembangunan melalui kegiatan pembentukan organisasi perencana pembangunan, kegiatan survey kampung mandiri dan kegiatan rembug, rencana, realiasi dan rawat dapat dijalankan dengan baik walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki akan tetapi tidak mengurangi substansi dari tumbuhnya proses pemberdayaan masyarakat dan motivasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut.

Adapun saran-saran dalam kegiatan ini adalah:

1. Diperlukan instrumen kontrol dan evaluasi dalam setiap perencanaan pembangunan perdesaan. Fungsi tersebut dapat dilakukan melalui sinerginya semua pihak dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam mendorong perencanaan pembangunan yang efektif, maka diperlukan pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai solusi efektif sebagai upaya untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai Subjek dalam penyelenggaraan program melalui proses pemberdayaan dan pembangunan partisipatif.
3. Tindak lanjut solusi guna mengatasi permasalahan memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat baik dari jajaran *top down* maupun *bottom up*, masyarakat selaku front line perencanaan pembangunan sejatinya dapat diikutsertakan secara aktif terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin.

Daftar Referensi

- Appel, K., Buckingham, E Jodoin, K., and D. Roth. *Participatory Learning and Action Toolkit: For Application in BSR's Global Programs*. Paris: BSR, 2012.
- Hasbullah, J. *Social Capital*. Jakarta: United Press, 2006.
- Phuyal, K. "Participatory Learning and Action [PLA]: A Brief Introduction."
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Indonesia, 2014.
- T, Mardikanto, and Soebiato P. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Theresia, Aprillia, and et all. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2104.